

PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM BERBASIS AJARAN PALEMAHAN PADA PENYEDIA JASA OPEN TRIP PENDAKIAN GUNUNG LAWU

Oleh:

Rudiyanto¹, Sujaelanto², Resmitra Wisnu Wardhana³

¹Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa, Klaten Jawa Tengah

¹Email: its.rudiyanto15@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 3 Maret 2026

Naskah Direvisi : 27 Maret 2026

Naskah Disetujui : 15 April 2026

Tersedia Online : 30 April 2026

Keywords:

Nature Tourism Management, Palemahan Teachings, Open Trip, Environmental Education

Kata Kunci:

Pengelolaan Pariwisata Alam, Ajaran Palemahan, Open Trip, Edukasi Lingkungan



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

ABSTRACT

The increasing number of climbers on Mount Lawu, particularly through open trip service providers, has led to environmental problems such as waste accumulation, water source pollution, and ecosystem damage. This study aims to describe the management and educational strategies implemented by open trip providers, identify supporting factors for the application of Palemahan teachings, and analyze the forms of collaboration between service providers and related institutions. A qualitative descriptive narrative approach was employed, involving five open trip providers operating on the Candi Cetho route: Oaoe Adventure, Tiga Dewa Adventure, Tebet Adventure, Green Lawu, and CFD Traveller. Data collection techniques included direct observation, in-depth interviews with owners, crew, guides, porters, participants, and informants from PUD (Regional Public Company) Aneka Usaha and Perhutani, as well as documentation studies. Data analysis used reduction, presentation, and conclusion drawing with source and technique triangulation. The study applies Cooper's 4A Tourism Destination Management Theory, Robert L. Kahn's Role Theory, and Emile Durkheim's Social Solidarity Theory. The findings indicate that management includes planning, implementation, evaluation, and supervision. Environmental education strategies are carried out through pre-climb briefings, role modeling, direct supervision, and the pack in pack out system with personal trash bags. Supporting factors include natural attractions, accessibility, facilities, environmental awareness, involvement of local porters, and social solidarity. The implementation of Palemahan values is realized through land protection, water conservation, fire control, waste management, and flora and fauna preservation. Collaboration with PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha, Perhutani, village government, volunteers, and local communities plays a crucial role in waste management, conservation, supervision, and law enforcement.

ABSTRAK

Meningkatnya aktivitas pendakian Gunung Lawu melalui penyedia jasa *open trip* menimbulkan persoalan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran sumber air, dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pengelolaan dan strategi edukasi penyedia jasa *open trip*, mengidentifikasi faktor pendukung penerapan ajaran Palemahan,

serta menganalisis implementasi kerja sama antara penyedia jasa dengan lembaga terkait. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif naratif. Subjek penelitian adalah lima penyedia jasa *open trip* yang beroperasi di jalur pendakian Candi Cetho, Kabupaten Karanganyar, yaitu Oaoe Adventure, Tiga Dewa Adventure, Tebet Adventure, Green Lawu, dan CFD Traveller. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik, *crew, guide, porter*, peserta, serta informan dari PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha dan Perhutani, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Teori yang digunakan adalah Teori Pengelolaan Destinasi Wisata (4A) dari Cooper, Teori Peran dari Robert L. Kahn, serta Teori Solidaritas Sosial dari Emile Durkheim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Strategi edukasi lingkungan dilakukan melalui *briefing*, keteladanan, pengawasan langsung, serta sistem *pack in pack out* dan kantong sampah. Faktor pendukung meliputi daya tarik alam, aksesibilitas, fasilitas, kesadaran lingkungan, keterlibatan *porter* lokal, dan solidaritas sosial. Implementasi nilai *Palemahan* diwujudkan melalui perlindungan tanah, penjagaan air, pengendalian api, pengelolaan sampah, serta pelestarian flora dan fauna. Kerja sama dengan PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha, Perhutani, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat lokal berperan penting dalam pengelolaan sampah, konservasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

I. PENDAHULUAN

Bagian Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam pendapatan suatu negara. Banyak faktor yang menjadikan sektor pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan, antara lain kebiasaan manusia modern yang senang bepergian, urgensi keinginan anak muda untuk bereksplorasi, serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat-tempat baru. Pariwisata alam kini menjadi tren karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan minat terhadap wisata petualangan (*nature-based tourism*). Berbagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dari aspek pariwisata semakin digencarkan, terutama pariwisata yang mengeksplorasi alam seperti wisata bahari, wisata pegunungan, wisata hutan, suaka alam, dan suaka margasatwa (Khotimah, 2017). Laporan hasil survei *Travel Redefined: Understanding and Catering to the Diverse Needs of APAC Travellers* yang dirilis oleh Traveloka bekerja sama dengan YouGov (Diah, 2025) menunjukkan bahwa 75% responden di kawasan Asia Pasifik menjadikan wisata alam sebagai pilihan utama dalam aktivitas perjalanan mereka. Data ini mengindikasikan bahwa pariwisata alam memiliki daya tarik yang kuat serta potensi pengembangan yang signifikan di tengah dinamika gaya hidup masyarakat modern yang cenderung mencari pengalaman relaksasi, ketenangan, dan kedekatan dengan lingkungan alami.

Salah satu bentuk wisata alam yang menjadi pilihan adalah pendakian gunung, seperti Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat, dengan situs-situs seperti Candi Cetho dan Candi Sukuh yang menunjukkan adanya aktivitas keagamaan sejak masa lampau. Meningkatnya jumlah pendaki setiap tahun

memunculkan berbagai penyedia jasa wisata, termasuk komunitas jasa *open trip* yang menawarkan paket pendakian. Jasa *open trip* adalah suatu perjalanan atau *tour* yang pesertanya bergabung dengan peserta lain dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak penyelenggara, sering disebut juga dengan *trip* gabungan (Chandra dkk., 2021). Di balik meningkatnya aktivitas pendakian, muncul berbagai persoalan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran sumber air, dan kerusakan ekosistem di sekitar jalur pendakian. Berdasarkan penelitian Sutirto (2017), kawasan Gunung Lawu menghadapi berbagai permasalahan: ruang terbuka hijau semakin berkurang karena pembangunan, banyak lokasi yang mengalami longsor, terjadi eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, berkurangnya jenis tumbuhan bahkan beberapa tidak ditemukan lagi, sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, sampah belum dikelola dengan baik, dan masih banyak lahan gundul yang belum ditanami tanaman keras yang sesuai untuk kawasan pegunungan. Permasalahan sampah, terutama sampah plastik yang volumenya bertambah seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung, menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata masih lebih menekankan aspek ekonomi dan rekreasi daripada keseimbangan alam. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma terhadap lingkungan.

Kesenjangan antara peningkatan aktivitas wisata dan upaya pelestarian lingkungan menjadi celah penting yang perlu diisi. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Ramadhan dkk. (2021) tentang strategi pengembangan agrowisata berbasis pemberdayaan komunitas di Pegunungan Menoreh dan Khotimah (2017) tentang pengembangan sadar wisata berdasarkan nilai budaya lokal, telah membahas pengelolaan pariwisata dengan melibatkan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji pengelolaan pariwisata alam dari perspektif ajaran agama, khususnya ajaran *Palemahan* dalam Hindu yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Ajaran *Palemahan* sebagai bagian dari *Tri Hita Karana* menawarkan landasan etis dan spiritual yang relevan untuk menjawab permasalahan lingkungan dalam pariwisata pendakian. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Palemahan* ke dalam praktik pengelolaan *open trip*, tidak hanya sebagai aturan teknis tetapi juga sebagai kesadaran moral dan spiritual. Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih minimnya kajian akademis yang menghubungkan ajaran Hindu, khususnya *Palemahan*, dengan pengelolaan pariwisata alam secara operasional di tingkat penyedia jasa wisata. Peneliti juga memiliki keterikatan pribadi dengan Gunung Lawu melalui pengelolaan *basecamp* dan keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan pariwisata alam berbasis ajaran *Palemahan* pada kegiatan pendakian Gunung Lawu yang melibatkan penyedia jasa *open trip*. Tujuan khususnya adalah: (1) mendeskripsikan bentuk pengelolaan dan strategi edukasi yang dilakukan oleh penyedia jasa *open trip* dalam kegiatan pendakian di Gunung Lawu; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dalam pengelolaan pariwisata pendakian Gunung Lawu berbasis ajaran *Palemahan*; dan (3) menganalisis bentuk implementasi kerja sama yang dibangun antara pengelola jasa *open trip* dengan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan pariwisata pendakian Gunung Lawu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pariwisata berbasis kearifan lokal serta manfaat praktis bagi penyedia jasa *open trip*, pengelola kawasan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata alam yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena pengelolaan pariwisata alam berbasis ajaran *Palemahan* secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di kawasan pendakian Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar,

Jawa Tengah, pada bulan Januari hingga Mei 2026. Subjek penelitian adalah lima penyedia jasa *open trip* yang beroperasi di jalur Candi Cetho: Oaoe Adventure, Tiga Dewa Adventure, Tebet Adventure, Green Lawu, dan CFD Traveller. Objek penelitian meliputi strategi edukasi lingkungan, bentuk pengelolaan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan), faktor pendukung, serta kerja sama dengan lembaga terkait. Sumber data terdiri atas data primer (observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik, *crew*, *guide*, *porter*, peserta, serta informan dari PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha dan Perhutani) dan data sekunder (buku, jurnal, skripsi, dokumen resmi). Instrumen penelitian adalah penulis sendiri dengan pedoman wawancara, kamera, dan perekam audio. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan *open trip* dan kawasan pendakian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pendakian, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi berupa foto, rekaman, dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data (sumber dan teknik) melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui *cross-checking* antar sumber data (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta diskusi dengan rekan sejawat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kelima penyedia jasa *open trip* (Oaoe Adventure, Tiga Dewa Adventure, Tebet Adventure, Green Lawu, dan CFD Traveller) telah menerapkan pengelolaan terstruktur melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, serta strategi edukasi lingkungan inovatif seperti sistem *pack in pack out* dan keteladanan langsung. Implementasi nilai Palemah tertcermin dalam praktik pelestarian tanah, air, api, udara, flora, dan fauna, sementara kerja sama multipihak dengan PUD Aneka Usaha, Perhutani, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat lokal menjadi faktor kunci keberlanjutan kawasan pendakian Gunung Lawu. Analisis dilakukan menggunakan Teori Pengelolaan Destinasi Wisata (4A) dari Cooper untuk menilai daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, dan kelembagaan; Teori Peran dari Kahn untuk memahami peran ganda penyedia jasa; serta Teori Solidaritas Sosial dari Durkheim untuk menjelaskan kerja sama antar pemangku kepentingan.

3.1 Pengelolaan dan Strategi Edukasi Penyedia Jasa Open Trip

Pengelolaan kegiatan wisata pada dasarnya merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Dalam konteks pariwisata berbasis alam, pengelolaan tidak hanya berorientasi pada kepuasan wisatawan tetapi juga pada kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kelima penyedia jasa *open trip*, ditemukan bahwa bentuk pengelolaan yang mereka terapkan bersifat mandiri dan semi-organisasi, dengan pembagian tugas antara koordinator trip, admin pendaftaran, *trip leader*, bagian logistik, serta anggota lapangan (*crew*, *guide*, *porter*, *sweeper*). Secara umum, pengelolaan yang dilakukan mencakup tiga tahapan utama yang berkelanjutan.

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan. Pada tahap ini, penyedia jasa menyusun *itinerary* perjalanan yang mencakup jalur pendakian, estimasi waktu tempuh, titik pemberhentian, waktu istirahat, hingga target pencapaian puncak. *Itinerary* disusun dengan mempertimbangkan kondisi fisik peserta (umumnya pendaki pemula hingga menengah) dan karakteristik jalur Candi Cetho yang memiliki panjang 10-12 km dengan waktu tempuh 8-10 jam. Penentuan jalur pendakian difokuskan pada jalur Candi Cetho (disebut juga jalur Simaksi) karena aksesibilitasnya yang relatif mudah (jalan beraspal hingga *basecamp*), ketersediaan pos-pos peristirahatan yang lengkap (Pos Simaksi, Pos 1 Mbah Branti, Pos 2 Brakseing, Pos 3 Cemoro Dowo dengan sumber air dan warung, Pos 4 Penggik, Pos 5 Bulak Peperangan, Gupakan Menjangan, Sabana,

Pasar Beng, Hargodalem, hingga Puncak Hargodumilah), serta nilai spiritual dari keberadaan Candi Cetho. Persiapan logistik dan perlengkapan meliputi penyediaan tenda, alat masak, konsumsi (enam kali makan: sarapan di basecamp, bungkus makan siang, makan malam, camilan, makan sebelum *summit*, dan sop buah), serta perlengkapan P3K.

Tarmin (Korwil Tiga Dewa Adventure) menjelaskan bahwa sistem *voting* menu diterapkan untuk meningkatkan kepuasan peserta:

"Peserta bisa memilih menu yang mereka inginkan sebelum keberangkatan, dan saya yang akan menyiapkan logistiknya berdasarkan pilihan terbanyak. Jadi setiap minggu menunya bisa berbeda."

Penyusunan aturan dasar bagi peserta menjadi elemen krusial dalam perencanaan. Aturan tersebut mencakup larangan membuang sampah sembarangan, kewajiban membawa kembali sampah pribadi (sistem *pack in pack out*), kewajiban mematuhi arahan *guide*, larangan membuat api unggun sembarangan, serta larangan merusak flora dan fauna. Aturan ini disampaikan melalui *briefing* yang juga mencakup pengecekan kesehatan dan perlengkapan.

Sebagaimana diungkapkan Danang Eko Priyono (pemilik OAOE Adventure):

"Briefing itu tidak melulu tentang jadwal, perjalanan, atau estimasi waktu. Tapi kita sampaikan semua terkait peraturan dan etika kita ketika di alam."

Fazrul (*guide* Tebet Adventure) menambahkan:

"Pertama untuk briefing sendiri, kita pasti melakukan pengecekan kesehatan kepada tamu yang akan mendaki karena itu wajib. Kita harus menanyakan kesehatan tamu terlebih dahulu. Kedua, kita menanyakan apakah perlengkapannya lengkap, karena terkadang ada tamu yang kurang edukasi mengenai peralatan seperti selimut dan P3K standar."

Standar operasional prosedur (SOP) sebelum keberangkatan juga meliputi pembagian kelompok berdasarkan kemampuan fisik, dengan penentuan peran *leader* (di depan), *middle* (di tengah), dan *sweeper* (di belakang). Dari perspektif Teori Peran (Kahn, 1965), penyedia jasa *open trip* menjalankan peran sosial yang kompleks: tidak hanya sebagai penyelenggara wisata tetapi juga sebagai edukator, pengawas, dan fasilitator. Ekspektasi sosial yang melekat pada peran ini mendorong mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan ke dalam setiap tahap perencanaan.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari seluruh perencanaan di lapangan. Pada tahap ini, penyedia jasa melakukan pendampingan aktif selama proses pendakian melalui *guide*, *leader*, *middle*, dan *sweeper*.

Muhamad Alfarizi (CFD Traveller) menjelaskan:

"Guide itu ada guide tengah dan sweeper. Sweeper itu bertugas memastikan semua peserta naik dan aman. Tidak boleh meninggalkan peserta yang di belakang. Dan guide tengah itu biasanya mengantisipasi jika ada peserta yang mengalami cedera seperti kram dan lain-lain."

Pembagian peran ini mencerminkan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim (1893), di mana setiap anggota tim memiliki tugas yang berbeda tetapi saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama (keselamatan dan keberhasilan pendakian). Tanpa koordinasi yang baik antara *leader*, *middle*, dan *sweeper*, risiko kecelakaan atau kehilangan peserta dapat meningkat signifikan. Pendampingan yang dilakukan *crew* tidak hanya bersifat teknis tetapi juga edukatif.

Arla Ridja Kiran (peserta CFD Traveller) menyatakan:

"Krunya benar-benar memimpin dari awal sampai kita selesai trekking. Mereka juga tidak hanya mengarahkan, tapi ikut membantu kami selama perjalanan, seperti mengingatkan aturan, membantu mendirikan tenda, dan memastikan semua peserta dalam kondisi aman."

Pendampingan ini menunjukkan adanya fungsi *ancillary services* dalam teori 4A Cooper (1993), yaitu keberadaan sumber daya manusia yang mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan. Edukasi lingkungan diberikan secara berkelanjutan selama pelaksanaan, tidak hanya pada saat *briefing* awal.

Danang Eko Priyono menjelaskan praktik pengelolaan sampah di lapangan:

"Misalkan ada 5 atau 10 orang, masing-masing kita beri kantong sampah. Ketika mengonsumsi makanan yang menghasilkan sampah, dibawa sendiri-sendiri. Nanti ketika sudah sampai di camp area, kita kumpulkan jadi satu. Besoknya saat perjalanan turun, kita bawa lagi masing-masing sampah tersebut. Sampah yang terkumpul selama di camp area akan kita packing jadi satu. Nanti ada tim porter juga yang membawa sampah itu turun kembali agar tidak tertinggal atau tercecer."

Sistem *pack in pack out* ini menjadi strategi inti dalam edukasi lingkungan. Bahkan sampah sekecil puntung rokok pun dikantongi dan dibawa turun, sebagaimana ditemukan dalam observasi lapangan.

Bapak Azat (peserta CFD Traveller) mengakui efektivitas edukasi tersebut:

"Selama perjalanan, guide dan crew sangat membantu, mereka selalu mengingatkan dan memastikan kita tetap mengikuti aturan yang sudah disampaikan sebelumnya."

Pengaturan ritme perjalanan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan. Tarmin menjelaskan sistem ketepatan waktu Tiga Dewa Adventure:

"Sebelum pendakian, di basecamp sudah dijelaskan estimasi waktu tiap pos dan waktu istirahat dibatasi agar tidak molor. Untuk summit, kita berangkat jam 03.00 pagi. Peserta dibangunkan jam 02.00 untuk persiapan minum dan makan. Di puncak kami beri waktu maksimal 1 jam karena masih ada sesi foto di Sabana selama 1 jam. Jam 10.00 semua harus sudah selesai di area camp untuk kembali ke basecamp."

Tahap evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, baik selama kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan selesai. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh *guide*, *leader*, dan *crew* lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Fazrul menjelaskan mekanisme sanksi yang diterapkan Tebet Adventure:

"Saya akan memberikan briefing dengan sedikit ancaman, seperti jika di trek ketahuan membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda karena pasti terpantau oleh tour leader atau porter lain. Saya mempunyai sistem saat turun untuk mengecek tenda berdasarkan nama peserta. Jika di tenda tersebut ada sampah tertinggal, peserta akan kena sanksi."

Penerapan sanksi denda ini merupakan bentuk pengawasan preventif yang bertujuan menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran peserta. Tarmin menambahkan bahwa evaluasi dilakukan setiap selesai *trip*:

"Evaluasi setiap keberangkatan trip pendakian itu selalu ada. Dari porter sendiri dievaluasi bagaimana cara melayani peserta dan cara mengajak bicara peserta di jalur. Sebab karakter peserta itu beda-beda; ada yang minta di-backup terus, ada yang keberatan membawa tas carrier-nya. Banyak sekali masukan dari peserta mengenai pelayanan, makanan, tenda, dan lain-lain."

Evaluasi ini mencakup aspek pelayanan, kebersihan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Pihak Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan lindung juga melakukan pengawasan. Rohaniyatun (Asper BKPH Lawu Utara) menyatakan:

"Pengawasan dilakukan saat registrasi di pos basecamp pendakian dengan mengecek jumlah personel yang akan naik dan memastikan mereka sudah kembali turun dengan membawa"

sampahnya. Kami juga menegur pendaki yang membuang sampah sembarangan di jalur pendakian."

Namun, ia mengakui kendala personel yang terbatas:

"Personel Perhutani tidak bisa standby di pos basecamp pendakian selama 24 jam."

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ideal membutuhkan kerja sama multi-pihak, termasuk penyedia jasa *open trip* dan masyarakat lokal. Dari perspektif Teori Peran, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana setiap pihak menjalankan peran sosialnya sesuai ekspektasi. Penyedia jasa yang konsisten menjalankan peran edukatif dan pengawasan cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan peserta yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendaki mandiri yang tidak mendapatkan pendampingan serupa.

3.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Pariwisata Pendakian Berbasis Ajaran Palemahan

Berdasarkan analisis menggunakan teori pengelolaan destinasi wisata (4A) dari Cooper (1993) yang terdiri atas *attraction, access, amenities, dan ancillary services*, faktor pendukung pengelolaan wisata pendakian Gunung Lawu dapat diidentifikasi secara komprehensif. Selain itu, faktor-faktor non-fisik seperti kesadaran lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, dan solidaritas sosial juga memegang peranan penting.

Atraksi wisata (*attraction*) merupakan faktor utama yang mendorong wisatawan untuk melakukan pendakian. Gunung Lawu memiliki panorama alam pegunungan yang khas dengan jalur pendakian yang bervariasi, vegetasi hutan pegunungan (pinus, cemara gunung, edelweis), udara yang sejuk dan segar, serta suasana spiritual yang tidak dimiliki banyak gunung lainnya karena keberadaan Candi Cetho dan peninggalan sejarah. Keindahan alam ini menjadi modal penting dalam menumbuhkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan, karena wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam cenderung lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestariannya.

Sebagaimana diungkapkan Bapak Azat (peserta CFD Traveller):

"Treknnya menyenangkan bagi saya."

Selain faktor alam, kesadaran lingkungan dari sebagian pendaki dan penyedia jasa juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Peserta CFD Traveller lainnya, Arla Ridja Kiran menyatakan:

"Alhamdulillah kami selaku peserta atau pencinta alam sangat mencintai alam, jadi sampah-sampah kami bawa kembali."

Penggunaan istilah "pencinta alam" menunjukkan adanya keterikatan emosional dan identitas moral yang mendorong perilaku pro-lingkungan. Kesadaran ini tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari edukasi berulang yang dilakukan oleh penyedia jasa *open trip* melalui *briefing*, keteladanan, dan pengawasan.

Aksesibilitas (*access*) menjadi faktor pendukung berikutnya. Jalur pendakian Candi Cetho (jalur Simaksi) terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dengan kondisi jalan beraspal hingga *basecamp*, sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jalur ini memiliki sistem registrasi yang dikelola oleh PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha, serta ketersediaan informasi perjalanan dari penyedia jasa *open trip* melalui grup WhatsApp, media sosial, dan komunikasi langsung. Karakteristik jalur Candi Cetho yang memiliki pos-pos peristirahatan lengkap dengan sumber air di Pos 3 Cemoro Dowo dan area *camp* yang luas di Pos 5 Bulak Peperangan serta Gupakan Menjangan menjadikannya cocok untuk pendaki pemula hingga menengah. Selain jalur Candi Cetho, terdapat pula jalur alternatif Cemoro Kandang yang lebih landai namun dengan intensitas pendakian yang lebih rendah. Aksesibilitas yang baik

memungkinkan penyedia jasa *open trip* untuk mengkoordinasikan keberangkatan dan kepulangan peserta dengan lebih teratur, termasuk dalam pengawasan sampah melalui pengecekan barang bawaan di *basecamp*.

Fasilitas pendukung (*amenities*) meliputi berbagai sarana dan jasa yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pendaki. Area *basecamp* seperti Basecamp Exotisme Lawu (milik Danang Eko Priyono), Basecamp Lawu Barokah (milik Sutarjo), dan Basecamp Andika Rahayu (milik Sugiono) berfungsi sebagai tempat registrasi, persiapan, istirahat, parkir, kamar mandi, warung makan, tempat pengisian daya (*charging*), dan koordinasi antara penyedia jasa, *porter*, *guide*, dan pengelola kawasan. Jasa pendampingan berupa *porter* lokal dan *guide* sangat membantu peserta, terutama pendaki pemula yang belum terbiasa membawa beban berat di medan pegunungan.

Tarmin menjelaskan pentingnya *porter* lokal:

"Porter lokal tidak menjamin keselamatan semua pendaki, tapi minimal kalau ada apa-apa penanganannya lebih cepat karena itu medannya dia. Dia orang lokal situ, lebih paham dan lebih terkoneksi dengan teman-teman basecamp."

Penggunaan *porter* lokal juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan. Selain itu, terdapat jasa transportasi (antar-jemput peserta dari stasiun atau bandara), jasa persewaan perlengkapan (tenda, matras, jaket gunung, sepatu, *carrier*), jasa kebersihan sukarela (dengan biaya Rp5.000 per peserta untuk menipkan sampah kepada *porter*), jasa kesehatan (P3K untuk penanganan darurat seperti cedera, kram, atau penyakit ringan), jasa dokumentasi (foto dan video), serta jasa konsumsi yang sudah termasuk dalam paket *open trip*. Keberagaman jasa pendukung ini secara kolektif membentuk ekosistem fasilitas yang menunjang keberhasilan kegiatan *open trip* dan pengelolaan lingkungan.

Kelembagaan (*ancillary services*) dijalankan oleh PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha sebagai pengelola operasional kawasan pendakian jalur Cetho (sejak April 2026), Perhutani sebagai pengawas kawasan hutan lindung, serta relawan dan masyarakat lokal yang mendukung kegiatan konservasi. PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha bertugas mengelola tiket, *basecamp*, *porter* lokal, dan fasilitas pendukung lainnya, serta sedang menyusun SOP dan sistem registrasi online. Perhutani memiliki kewenangan dalam pengawasan aktivitas pendakian, pengaturan jalur, konservasi lingkungan, hingga penutupan jalur apabila terjadi kondisi tertentu seperti cuaca ekstrem atau kebakaran hutan. Rohaniyatun menyebutkan kegiatan yang dilakukan Perhutani: *"Kami juga mengadakan kegiatan gotong royong kerja bakti bersih gunung bersama relawan, pelatihan siaga bencana kebakaran hutan bersama BPBD dan Basarnas, serta penanaman bibit pohon bersama segenap stakeholder."* Keterlibatan masyarakat lokal, solidaritas sosial antara penyedia jasa, *porter*, *guide*, dan peserta, serta kesadaran lingkungan yang mulai tumbuh juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, masih terdapat tantangan koordinasi.

Tarmin mengungkapkan kekecewaannya terhadap *open trip* lain yang tidak tertib sampah:

"Kami dari Tiga Dewa sudah menjaga lingkungan, peserta dan porter sudah diberitahu, tapi masih ada oknum OT lain yang seenaknya membuang sampah sembarangan. Dampaknya kena ke Tiga Dewa juga. Ibarat ada lima open trip, tapi jika yang empat tidak tertib, otomatis kelima-limanya kena dampak semua."

Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial horizontal antar penyedia jasa masih perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi rutin dan mekanisme sanksi kolektif.

3.3 Implementasi Nilai *Palemahan* dalam Praktik Pendakian

Ajaran *Palemahan* sebagai bagian dari *Tri Hita Karana* menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dalam konteks pendakian Gunung Lawu, nilai ini tidak hanya dipahami secara normatif tetapi diimplementasikan dalam berbagai praktik nyata oleh penyedia jasa *open trip*. Implementasi tersebut mencakup perlindungan terhadap unsur-unsur alam yang disebut dalam sloka Bhagavad Gita VII.4: tanah (*bhumi*), air (*apah*), api (*anala*), udara (*vayuh*), serta flora dan fauna sebagai bagian dari ekosistem yang utuh.

Penjagaan kestabilan tanah dan jalur pendakian diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap pergerakan peserta. Aktivitas pendaki yang berjalan di luar jalur resmi, membuat jalur alternatif (*shortcut*), atau mendirikan *camp* di area terlarang dapat menyebabkan erosi tanah, kerusakan vegetasi, dan hilangnya fungsi resapan air. Penyedia jasa *open trip* melakukan pengawasan melalui sistem *leader*, *middle*, dan *sweeper* untuk mencegah hal-hal tersebut.

Fazrul menjelaskan:

"Sistem kita dalam pendakian ada yang namanya leader, middle, dan sweeper agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan."

Selain itu, *briefing* juga mencakup edukasi tentang etika berjalan di jalur pendakian, seperti larangan memotong jalur dan menggunakan area *camp* di luar titik yang ditentukan. Kebijakan penutupan pendakian minimal satu bulan dalam satu tahun oleh Perhutani juga merupakan bentuk pengelolaan berbasis konservasi untuk memberikan waktu pemulihan bagi tanah dan vegetasi.

Rohaniyatun menyatakan:

"Ada penutupan pendakian minimal selama satu bulan dalam satu tahun untuk perbaikan jalur dan perbaikan konservasi hutan."

Dalam perspektif *Palemahan*, penutupan ini adalah pengakuan bahwa tanah memiliki keterbatasan daya dukung dan membutuhkan waktu pemulihan, sebagaimana diajarkan bahwa alam bukanlah objek eksploitasi tanpa batas.

Penjagaan sumber air menjadi sangat kritis karena kawasan Gunung Lawu memiliki beberapa sumber mata air yang digunakan oleh pendaki dan masyarakat di bawahnya, seperti Wono Tirto. Pencemaran sumber air akibat sampah plastik, sisa makanan, limbah sabun dari aktivitas mencuci peralatan atau mandi, serta buang air besar sembarangan dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan. Penyedia jasa *open trip* memberikan edukasi larangan mencuci peralatan menggunakan sabun di dekat mata air, larangan membuang sampah di sekitar sumber air, serta kewajiban membawa turun sampah melalui sistem *pack in pack out*.

Danang Eko Priyono menegaskan:

"Kita tetap edukasi dan beri pemahaman untuk menjaga kebersihan serta kelestarian alam gunung, khususnya yang kita lewati atau jadikan sumber wisata."

Peserta diarahkan untuk mengambil air secukupnya, tidak mencemari, dan melaporkan jika menemukan sumber air yang tercemar. Pihak Perhutani juga melakukan sosialisasi melalui papan larangan dan imbauan di sekitar sumber air.

Pengendalian api merupakan aspek krusial mengingat kawasan Gunung Lawu termasuk rawan kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan Gunung Lawu pada tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa kelalaian dalam penggunaan api dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas, menghancurkan habitat satwa, dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Penyedia jasa *open trip* memberikan edukasi melalui larangan membuat api unggun sembarangan, penggunaan kompor *portable* secara aman (hanya di area yang ditentukan dan dengan pengawasan), serta kewajiban memastikan

api benar-benar padam sebelum meninggalkan area *camp*. Edukasi ini juga mencakup larangan membuang puntung rokok sembarangan, yang sering menjadi penyebab kebakaran. Rohaniyatun menyebutkan bahwa ancaman kebakaran hutan menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan kawasan. Perhutani mengadakan pelatihan siaga bencana kebakaran hutan bersama BPBD dan Basarnas, serta melibatkan relawan dan masyarakat lokal dalam pemadaman jika terjadi kebakaran. Dalam perspektif *Palemahan*, pengendalian api tidak hanya berkaitan dengan prosedur keselamatan tetapi juga merupakan bentuk pengendalian diri (*ahankara* atau ego) sebagaimana disebut dalam Bhagavad Gita VII.4. Ego yang tidak terkendali membuat manusia bertindak ceroboh demi kenyamanan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap alam.

Menjaga kebersihan udara dan pengelolaan sampah menjadi implementasi yang paling dominan dan kasat mata. Volume sampah di jalur pendakian Gunung Lawu, terutama sampah plastik, sisa makanan, tisu, botol minuman, dan puntung rokok, terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pendaki. Kebiasaan membakar sampah secara sembarangan juga berpotensi mencemari udara dan memicu kebakaran hutan. Penyedia jasa *open trip* menerapkan sistem *pack in pack out* secara ketat: setiap peserta wajib membawa turun kembali seluruh barang dan sampah yang dibawa ke kawasan pendakian.

Danang Eko Priyono menegaskan:

“Sekecil apa pun sampah, kita sediakan kantong untuk dibawa.”

Setiap peserta dibekali kantong sampah pribadi sebelum memulai pendakian. Di *camp area*, sampah dikumpulkan menjadi karung besar dan dibawa turun oleh *porter* khusus sampah. Beberapa *open trip* bahkan menerapkan sistem jasa kebersihan sukarela bagi peserta yang tidak sanggup membawa sampah sendiri. Papan himbauan dengan kalimat sarkas seperti “Foto elit bawa sampah turun sulit” dan “Hanya kera yang boleh membuang sampah sembarangan” dipasang di sepanjang jalur pendakian. Kalimat sindiran yang tegas namun komunikatif ini terbukti efektif karena langsung tertangkap oleh banyak pendaki sebagai pengingat yang tidak bisa diabaikan. Rohaniyatun menambahkan bahwa pihak Perhutani berupaya menerapkan aturan yang harus dipatuhi semua pendaki melalui media sosial, sosialisasi sebelum mendaki, *screening* yang lebih detail di lapangan, serta penerapan denda atau *blacklist* terhadap pendaki yang tidak mematuhi aturan.

Pelestarian flora dan fauna merupakan dimensi penting dari ajaran *Palemahan* yang sering terabaikan. Kawasan Gunung Lawu memiliki keanekaragaman flora seperti cemara gunung, edelweis (yang dilindungi), berbagai jenis lumut dan paku-pakuan, serta fauna seperti monyet ekor panjang, elang, dan berbagai burung. Aktivitas pendakian yang tidak terkontrol dapat mengancam kelestarian flora dan fauna, misalnya melalui pemetikan edelweis, perusakan vegetasi untuk membuka jalur atau *camp*, pemberian makanan kepada satwa liar yang dapat mengubah perilaku alami mereka, serta pengambilan batu atau tumbuhan sebagai cendera mata. Penyedia jasa *open trip* memberikan edukasi melalui larangan memetik tanaman, merusak vegetasi, memberi makan satwa liar, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Rohaniyatun dari Perhutani menyebutkan bahwa larangan merusak flora dan fauna telah tertuang dalam kebijakan resmi.

Hal ini sejalan dengan sloka Bhagawadgita XII.13:

“Adveṣṭā sarva-bhūtānām maitraḥ karuṇa eva ca”

(Ia yang tidak membenci makhluk hidup mana pun, bersahabat dan penuh kasih kepada semua makhluk).

Selain itu, ajaran Nitisastra I.10 mengingatkan bahwa singa (makhluk hidup) dan hutan (alam) saling membutuhkan; jika hubungan ini rusak, keduanya akan binasa. Analogi ini sangat relevan dengan peran penyedia jasa *open trip* sebagai penjaga kawasan hutan. Jika

mereka tidak menjalankan perannya dengan baik, kawasan hutan akan rusak, yang pada gilirannya akan mengurangi keindahan alam dan daya tarik wisata itu sendiri.

3.4 Bentuk Implementasi Kerja Sama antara Penyedia Jasa Open Trip dengan Lembaga Terkait

Pengelolaan pariwisata pendakian yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh penyedia jasa *open trip*, melainkan memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kepedulian terhadap kelestarian kawasan Gunung Lawu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha dan Perhutani, ditemukan bahwa kerja sama yang telah berjalan maupun yang direncanakan ke depan mencakup berbagai aspek.

Perbedaan pengelola kawasan: PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha dan instansi pemerintah. PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha sebagai badan usaha milik desa bertugas mengelola operasional pendakian jalur Cetho, meliputi pengelolaan tiket pendakian, *basecamp*, *porter* lokal, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, instansi pemerintah seperti Perhutani (pengelola kawasan hutan lindung), Pemerintah Desa Gumeng, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan dalam aspek kebijakan, pengawasan, dan konservasi kawasan. Perbedaan peran ini penting dipahami karena kerja sama dengan pengelola kawasan lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan teknis pendakian, sedangkan kerja sama dengan instansi pemerintah berkaitan dengan regulasi, pengawasan, dan pelestarian lingkungan.

Titin Riyadiningsih (Kepala Bidang Operasional PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha) menjelaskan bahwa PUD (Perusahaan Umum Daerah) baru mulai mengelola sejak 1 April 2026 dan masih dalam masa transisi:

"Kami tidak bisa langsung eksekusi seperti langsung mendenda, karena tiket dinaikkan untuk membangun sistem. Kami harus membersihkan jalur dan mengurangi sampah di basecamp maupun di atas terlebih dahulu, baru kita eksekusi maksimal dalam tiga bulan. Kami juga melibatkan pihak lapangan dalam pembuatan SOP ini agar tidak hanya sekedar teori."

Ia juga menekankan rencana ke depan:

"Ke depannya, kami ingin semua porter berasal dari warga lokal. Kami sudah meminta database porter dari relawan dan LMDH. Melalui registrasi online, pendaki bisa memilih basecamp dan porter secara bergiliran agar semuanya mendapatkan dampak ekonomi."

Kerja sama dalam pengelolaan sampah dan konservasi. Bentuk kerja sama yang paling terlihat adalah koordinasi antara penyedia jasa *open trip*, PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha, Perhutani, *porter* lokal, relawan, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan bersih gunung, pengawasan aktivitas pendaki, dan upaya konservasi.

Rohaniyatun menjelaskan:

"Kami juga mengadakan kegiatan gotong royong kerja bakti bersih gunung bersama relawan, pelatihan siaga bencana kebakaran hutan bersama BPBD dan Basarnas, serta penanaman bibit pohon bersama segenap stakeholder."

Kegiatan bersih gunung biasanya dilakukan minimal dua kali setahun, melibatkan puluhan hingga ratusan relawan dari komunitas pendaki, mahasiswa, dan warga lokal. Selain itu, penyedia jasa *open trip* juga melaporkan temuan titik-titik sampah menumpuk atau kerusakan lingkungan kepada pengelola *basecamp* atau Perhutani. Kerja sama ini mencerminkan Teori Solidaritas Sosial Durkheim, khususnya solidaritas organik, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda tetapi saling membutuhkan. PUD (Perusahaan Umum Daerah) mengelola administrasi dan fasilitas, Perhutani mengawasi kawasan hutan dan menegakkan aturan, *open trip* menjalankan edukasi dan pendampingan,

sementara relawan dan masyarakat lokal membantu kegiatan konservasi dan pengawasan partisipatif.

Danang Eko Priyono menambahkan pentingnya melibatkan masyarakat setempat:

"Jangan lupa libatkan masyarakat setempat. Tanpa masyarakat setempat, semua itu cuma akan menjadi acuan tertulis saja dan tidak akan berjalan lama."

Keterlibatan masyarakat lokal sebagai *porter*, pengelola *basecamp*, pelaku UMKM, dan anggota relawan membuat aturan tidak hanya bersifat formal tertulis tetapi juga terimplementasi melalui pengawasan sosial di lapangan.

Kerja sama dalam pengawasan dan penegakan aturan. Pengawasan aktivitas pendakian dan penegakan aturan kawasan dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak. Penyedia jasa *open trip* melalui *guide*, *leader*, *middle*, dan *sweeper* mengawasi perilaku peserta selama pendakian, memastikan mereka tetap di jalur resmi, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak vegetasi. Masyarakat lokal, terutama *porter* dan warga sekitar, juga berperan dalam memantau kondisi jalur, memberikan informasi mengenai titik rawan longsor atau pohon tumbang, serta melaporkan jika terjadi pelanggaran.

Pihak Perhutani melakukan pengawasan melalui petugas *ranger* yang berpatroli di jalur pendakian, meskipun jumlahnya terbatas. Rohaniyatun menjelaskan kendala personel:

"Personel Perhutani tidak bisa standby di pos basecamp pendakian selama 24 jam."

PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha berencana menerapkan sistem registrasi online dengan pengecekan barang bawaan (foto saat naik dan turun) untuk mengontrol sampah pendakian, serta standarisasi fasilitas *basecamp* (termasuk tarif layanan seperti *charging* dan kamar mandi) untuk menghindari persaingan tidak sehat.

Titin Riyadiningsih menyatakan:

"Ke depannya harus ada standarisasi di basecamp. Dengan registrasi online, semua basecamp akan mendapatkan kuota pendaki secara adil. Kami akan duduk bersama dengan pengelola basecamp untuk menentukan apakah biaya seperti cas HP sudah termasuk dalam paket registrasi atau belum. Jika sudah ada standar tapi ada yang tidak mau mengikuti, risikonya akan kami blacklist dari sistem registrasi online."

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kerja sama. Tarmin mengusulkan perlunya paguyuban *porter* lokal yang kuat: *"Jika Ceto punya paguyuban porter lokal yang kuat, kita bisa buat peraturan. Misalnya, pihak luar yang membawa OT ke Ceto wajib menggunakan jasa porter lokal sini."* Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang lebih terstruktur dan terlembaga sangat diperlukan untuk mengatasi persaingan tidak sehat, memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal, dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, belum adanya forum komunikasi rutin antara penyedia jasa *open trip*, PUD (Perusahaan Umum Daerah), Perhutani, dan pemerintah desa menyebabkan koordinasi masih bersifat parsial dan insidental. Ke depan, diperlukan penguatan forum koordinasi multipihak, penyusunan regulasi tertulis yang mengatur kewajiban penggunaan *porter* lokal dan pengecekan barang bawaan, serta peningkatan kesadaran lingkungan melalui edukasi yang berkelanjutan, tidak hanya kepada peserta *open trip* tetapi juga kepada pendaki mandiri.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata alam berbasis ajaran *Palemahan* pada penyedia jasa *open trip* pendakian Gunung Lawu mencakup tiga tahapan utama yang berkelanjutan: perencanaan (penyusunan *itinerary*, penentuan jalur, persiapan logistik dan perlengkapan, penyusunan aturan dasar, serta penerapan SOP melalui *briefing* dan pengecekan kesehatan/perengkapan), pelaksanaan

(pendampingan oleh *guide*, *leader*, *middle*, dan *sweeper*, pengaturan ritme perjalanan, serta penerapan edukasi lingkungan langsung seperti pembagian kantong sampah dan pengawasan perilaku), serta evaluasi dan pengawasan (pemberian sanksi atau denda bagi pelanggar, pengecekan sampah di area *camp* dan tenda, evaluasi pasca pendakian yang melibatkan masukan peserta, serta koordinasi dengan pengelola kawasan). Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa penyedia jasa *open trip* tidak hanya berperan sebagai penyelenggara wisata (sesuai Teori Peran Kahn), tetapi juga sebagai pengawas, edukator, dan agen pelestarian lingkungan.

Strategi edukasi lingkungan yang diterapkan penyedia jasa *open trip* terbagi menjadi tiga pendekatan utama: edukasi melalui *briefing* sebelum pendakian (berisi aturan etika pendakian, larangan membuang sampah, kewajiban membawa turun sampah pribadi, serta penjelasan kondisi jalur dan prosedur keselamatan), edukasi melalui keteladanan dan pengawasan langsung selama di jalur (di mana *guide*, *porter*, *leader*, dan *sweeper* memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan, mematuhi jalur resmi, serta mengingatkan peserta secara berkelanjutan), serta edukasi melalui sistem *pack in pack out* dan pembagian kantong sampah pribadi (yang membangun tanggung jawab individu terhadap sampah yang dihasilkan selama pendakian, termasuk sampah sekecil puntung rokok). Strategi ini terbukti efektif dalam membentuk kesadaran peserta, meskipun masih menghadapi kendala pada pendaki mandiri yang tidak mendapatkan edukasi serupa.

Faktor pendukung pengelolaan wisata pendakian Gunung Lawu berbasis ajaran *Palemahan* meliputi daya tarik alam yang masih asri (panorama pegunungan, jalur bervariasi, udara sejuk, nilai spiritual Candi Cetho), aksesibilitas jalur pendakian yang relatif mudah (khususnya Jalur Candi Cetho dengan jalan beraspal hingga *basecamp* dan pos-pos peristirahatan lengkap), keberadaan fasilitas pendukung seperti *basecamp*, jasa *porter* lokal, *guide*, transportasi, persewaan perlengkapan, konsumsi, dokumentasi, kesehatan, serta jasa kebersihan sukarela, meningkatnya kesadaran lingkungan dari sebagian peserta dan penyedia jasa (sebagai hasil dari edukasi berulang), keterlibatan masyarakat lokal sebagai *porter* dan pengelola *basecamp* yang memberdayakan ekonomi sekaligus pengawasan sosial, serta solidaritas sosial antar pemangku kepentingan (meskipun solidaritas horizontal antar penyedia jasa masih perlu ditingkatkan). Faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi terbatasnya personel pengawasan dari Perhutani, belum optimalnya koordinasi multipihak, serta masih adanya pendaki mandiri dan oknum *open trip* yang tidak tertib sampah.

Implementasi nilai *Palemahan* dalam praktik pendakian diwujudkan melalui perlindungan tanah (pengawasan jalur melalui sistem *leader/middle/sweeper*, edukasi larangan membuat jalur alternatif, penutupan jalur berkala untuk pemulihan), penjagaan sumber air (edukasi larangan mencuci pakai sabun di mata air, larangan membuang sampah di sekitar sumber air, sistem *pack in pack out*), pengendalian api (larangan api unggun sembarangan, penggunaan kompor *portable* yang aman, pelatihan siaga kebakaran hutan bersama BPBD dan Basarnas, larangan membuang puntung rokok), pengelolaan sampah dan kebersihan udara (sistem *pack in pack out*, pembagian kantong sampah pribadi, pengumpulan sampah di *camp area*, jasa kebersihan sukarela, sanksi denda, papan himbauan sarkas), serta pelestarian flora dan fauna (larangan memetik edelweis, merusak vegetasi, memberi makan satwa liar, serta edukasi tentang keseimbangan ekosistem). Nilai-nilai ini bersumber dari sloka Bhagavad Gita VII.4 tentang delapan unsur alam dan ajaran *Tri Hita Karana* yang menekankan harmoni manusia dengan alam.

Kerja sama antara penyedia jasa *open trip* dengan PUD (Perusahaan Umum Daerah) Aneka Usaha (pengelola operasional), Perhutani (pengawas kawasan hutan), pemerintah desa, relawan, dan masyarakat lokal berperan penting dalam pengelolaan sampah (kegiatan bersih gunung, pelaporan titik sampah), konservasi (penanaman pohon, pelatihan siaga kebakaran), pengawasan (patroli bersama, pengecekan barang bawaan), dan penegakan aturan (pemberian sanksi, *blacklist*). Namun, koordinasi antar pihak masih perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi rutin, penyusunan regulasi tertulis tentang kewajiban penggunaan *porter* lokal dan pengecekan barang bawaan pendaki (naik dan turun), standarisasi fasilitas *basecamp*, serta penguatan paguyuban *porter* lokal untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekman, Chandra, M. E., Afriandhani, M. A. R., & Karima, I. S. (2021). Rancang Bangun Website Jasa Open Trip & Penyewaan Alat Pendakian Tripus.Com. *Jukomika (Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika)*, 4(1), 1-13.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and Practice*. London: Pitman Publishing.
- Diah, F. (2025, Februari). Studi Traveloka: Turis RI Lebih Suka Liburan Dalam Negeri, Pertimbangkan Bujet. Diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-7766296/>
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Hasanah, M. (2017). Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. New York: John Wiley & Sons.
- Khotimah, N. (2017). Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Lingkungan. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 6(2).
- Primayana, K. H., & Sastrawan, K. B. (2021). Urgensi Manajemen Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Tri Hita Karana*. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 63.
- Ramadhan, M. R., dkk. (2021). Strategi Pengembangan Wilayah Agritourism di Pegunungan Menoreh Berbasis Pemberdayaan Komunitas. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*.
- Rijal, A., Nurwulan, R. R. L., & Supriatna, U. (2020). Tingkat kesadaran para pendaki gunung terhadap lingkungan taman wisata alam gunung papandayan. *GEOAREA | Jurnal Geografi*, 3(2), 40-48.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91-113.
- Subagiassa, I. K. (2025). *Filosofi Asta Prakrti*. Diakses dari <https://gitasantihnusantara.org/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutirto, T. W. (2017). Pengelolaan Lingkungan Desa Wisata Berwawasan Go Green Di Kawasan Gunung Lawu. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 18.
- Syaputra, R. (2019). Perencanaan Pengelolaan Sampah di Jalur Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Widowati, L., Hastuti, N. H., & Rizqi, F. M. (2024). Communication Strategies To Increase Participant Engagement. *Jurnal Komunikasi*.
- Wulandari & Sutajaya. (2022). Implementasi Nilai *Palemahan* Dalam Ajaran *Tri Hita Karana* Terhadap Hasil Project Gaya Hidup Berkelanjutan. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 01-10.